KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN PEREKONOMIAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PASCA COVID-19 DI NAGARI BALINGKA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



OLEH:

RAHMAD RUSDI

3217.118

DOSEN PEMBIMBING:

Nini Sumarni, SE, M.Si

NIP:198810232018012003

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 1443 H / 2023M

ABSTRAK

Rahmad Rusdi, NIM 3217118, Prodi Ekonomi Islam, Skripsi ini berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Perekonomian Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Pasca Covid-19 Di Nagari Balingka Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam**"**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tingat Kemiskinan di nagari Balingka dengan angka 343 KK Tahun 2022, Dengan mengatasi masalah ini maka Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan di nagari Balingka kecamatan Iv Koto kabupaten Agam, bagaimana efektivitas pemerintah dalam pelaksanaan program keluarga harapan dinagari balingka Kecamatan IV koto, Bagaimana peran Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat mengenai program keluarga harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di nagari Balingka Kecamatan IV koto Kabupaten Agam.

Metode penelitian penulis yang gunakan adalah field researc untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang di teliti, dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ini merupakan data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang terlibat langsung yaitu pendamping PKH dan peserta KPM Nagari Balingka, Dengan Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Dalam

Pemulihan Perekonomian Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Pasca Covid-19 Di Nagari Balingka Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam belum meningkatkan perekonomian KPM hanya meningkatkan tingkat konsumtif saja belum produktif.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Perekonomian, PKH*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"**Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BUMNag Lumbuang Limo Sarumpun Nagari Ampang Gadang Di Kecamatan Ampek Angkek)"**.** Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, pertama sekali kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Rusdi** dan Ibunda tercinta **Sulastri** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Serta **Adik** saya tercinta **Rafiq Agustian** yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta doa bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengai selesai.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan rintangan, namun berkat bantuan, motivasi, seta bimbingan dari beberapa pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof.Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak **Hesi Eka Putri SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu **Rika Widianita, SEI, ME** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sjeh Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibuk **Nini Sumarni, SE, M.Si** selaku pembimbing**,** yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **H.Hasan Basri Na'ali, LC, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu selama proses belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini.
5. Bapak kepala beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri

(UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibuk Kesos IV Koto yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi berserta doa dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 4 Januari 2023

Penulis

Rahmad Rusdi

NIM : 3217.118

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Batasan masalah..... 7

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7

F. Penjelasan Judul..... 8

G. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perekonomian 12

B. Komsumsi..... 18

C. Program Keluarga Harapan..... 22

D. Covid-19..... 26

E. Kajian Terdahulu..... 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 30

B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 30

C. Teknik Sampling..... 31

D. Jenis dan Sumber Data..... 32

E. Informan Penelitian..... 32

F. Teknik Pengumpulan Data..... 33

G. Teknik Analisis Data..... 30

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 35

B. Program Keluarga Harapan Di Nagari Balingka..... 54

C. Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian KPM.....59

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DOKUMENTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus COVID-19 (*Corona Virus Diesease* 2019) pertama kali dilaporkan pada awal maret tepatnya di tahun 2020 di kota Depok, Jawa Barat. Virus yang ditemukan di negara Tiongkok ini bemutasi begitu cepat dan menyebabkan perubahan Ekonomi drastis di hampir tiap negara, Bidang kesehatan yang berperan besar di masa pandemi menunjukkan betapa banyak angka kasus yang naik hingga tidak meratanya fasilitas ksehatan. Negara-negara di dunia yang terjangkit wabah ini, mendadak mengumumkan kebijakan baru dalam upaya pengendalian penyebaran infeksi Covid-19, yakni *lockdown*. Pemerintah mengambil tindakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang bertujuan memutus rantai penyebaran virus, layaknya sistem *social distancing*. Usaha pemerintah dalam menghentikan penyebaran ini dimulai dengan pengupayaan aktivitas daring yang dikenala dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) untuk siswa/i dan mahasiswa/i. Sementara itu, dalam dunia perkantoran menggunakan sistem WFH *(Work from Home)* dalam skala nasional yang mengandalkan teknologi. Efek dari beberapa kebijakan tersebut masuk ke berbagai lini kehidupan, tak hanya sisi pendidikan dan kesehatan namun juga kehidupan bersosial seperti penundaan kegiatan kemasyarakatan.

Tak menampik fakta bahwa PSBB membawa dampak tersendiri, terkhusus di sektor ekonomi. Berdasarkan laporan *International Monetary Fund* (IMF) 2020, pertumbuhan ekonomi global mengalami downgrade dan mendarat di

angka minus.[1] Hal ini masuk akal mengingat penerapan anjuran pembatasan sosial yang membuat masyarakat tetap berada di rumah dan mengakses segala hal seperti; pendidikan, pekerjaan, hiburan bahkan pemenuhan kebutuhan melalui teknologi komunikasi. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) juga mengungkapkan jika pandemi kali ini mengancam kestabilan ekonomi dan memungkinkan timbulnya krisis usai terhentinya berbagai aktivitas di banyak negara. Juga tingkat konsumsi yang menurun serta lunturnya kepercayaan konsumen. Bahkan pengaruh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 tidak lebih besar dari krisis pandemi global ini.

Di tahun 1998 saat krisis moneter bergejolak, dampak hanya dirasakanpada beberapa sektor tertentu, yang ditandai pemerosotan nilai penukaran rupiah dan merendahnya harga jual barang. Dampak krisis pandemi ini mempunyai jangkauan lebih luas, yakni di skala makro maupun mikro. Misalnya seperti tidak stabilnya sisi produksi yang menurun ke rantai distribusi dan berkurangnya konsumsi masyarakat. Berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, kondisi masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di rumah di situasi *lockdown*, perlahan menyebabkan penurunan permintaan yang memengaruhi angka jumlah produksi untuk terus menurun.

Situasi berantai yang mengguncang kondisi ekonomi ini juga dapat mengganggu mekanisme kelancaran pasar antara permintaan dan penawaran yang sulit untuk kembali berjalan normal. Mengingat *supply*, *demand* dan *supply-chain* yang berperan sebagai aspek vital ekonomi telah terganggu, maka

---

1 Ariana Luthfiana dan Alip sugianto, *Strategi Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia,* Seminar Nasional Dan Kemandirian Daerah, hal 2

masyarakat tak dapat mengelak dari dampak krisis yang tersebar merata ke seluruh lapisan. Dampak riil di sektor ekonomi di skala mikro akan merambat ke sektor keuangan karena banyak *investee* yang berpotensi mengalami kesulitan untuk membayar investornya. Sebagian besar efek buruk yang melanda kesejahteraan masyarakat bersumber pada resesi ekonomi global karena rantai pasokan yang terhambat dan melanda pasar keuangan. Pandemi yang muncul di luar prediksi ini belum menunjukkan kepastian keberakhiran serta perlu waktu bagi dunia untuk kembali memulihkan diri dari kondisi krisis ini.

Banyak orang berspekulasi bahwa pandemi akan menciptakan perubahan permanen dalam pola kerja masyarakat, bersosial, politik, kesehatan, keamanan, produksi, perdagangan, pertanian, dan berbagai aspek lain. Dikarenakan virus pandemi ini suatu hal baru di dunia, maka berkemungkinan besar bagi beberapa negara mengharuskan pemerintahannya untuk mengembangkan strategi baru dalam memulihkan kondisi untuk kembali normal.

Pada tanggal 17 Mei 2022, pemerintah indonesia sudah mengizinkan untuk melepaskan masker di luar ruangan, sesuai dengan peryataan bapak presiden Indonesia yaitu Ir Joko Widodo.

> *Yang pertama pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan*

atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker.[2]

Dari peryataan presiden menandakan bahwa pendemi Covid 19 sudah mulai terkendali dengan baik. Tentu dengan terkendali ini mulai lah namanya kebijakan kebijakn pasca Covid-19 yang akan di terapkan oleh pemerintah.

Khusunya daerah Sumatra Barat kabupaten Agam, kecamatan IV Koto saat ini telah menerapkan new normal setelah dilanda pendemi Covid-19. Dari segi pemerintah tentu menerapkan beberapa kebijakn untuk segi pelayanan untuk saat ini telah kembali normal sebelum Covid 19 melanda.

Tentu bukan hanya saja dari segi pelayanan saja pemerintah berikan kepada masyarakat saat new normal saat ini. Tentu dari segi bantu atau kebijakan ekonomi untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaan bantuan sosial dilaksanakan ke salah satu program pemerintah yaitu program keluarga harapan.

Program keluarga harapan di kecamatan IV Koto masih menerima bantuan pada masa covid-19 dan paca pandemi covid-19. Dengan bantuan pemerintah pasca covid-19 diharapkan dapat memulihkan ekonomi penerima program keluarga harapan.

Dengan adanya bantuan pemerintah terhadap masyarakat yang terlibat dalam program keluarga harapan di kacamatan IV Koto diharapkan dapat meningkatkan atau memulihkan perekonomian.walaupun bantuan pemerintah melalui program keluarga harapan seperti bahan-bahan pokok

2https://www.liputan6.com/news/read/4964641/jokowi-umumkan-masyarakat-boleh-lepas-masker-ini-pernyataan-lengkapnya di akses pada 2 September 2022

beras,telor,minyak,gula dan lain-lain, apakah dengan bantuan ini dapat memulikan perekonomian masyarakat yang menjadi angota penerima program keluarga harapan? Karen bantuan konsumtif.

Kondisi ekonomi masyarakat kecamatan IV Koto Kabupaten Agam saat pandemi melanda mengalami penurunan pendapatan karena berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menyebabkan para pedagang atau petani mengalami keterbatasan melakukan kegiatan perekonomian seperti biasanya, masyarakat mengalami kekurangan bahan-bahan pokok harian. Dengan ini pemerintah memberikan bantuan berupa sembako seperti beras,minyak,telur hingga uang tunai. Dengan adanya bantuan pemerintah kepada masyarakat dapat membantu kebutuhan pokok masyarakat pada saat pandemi berlangsung.

Pada tanggal 17 Mei 2022, pemerintah indonesia sudah mengizinkan untuk melepaskan masker di luar ruangan.[3] Hal ini menandakan pandemi sudah dapat dikendalikan oleh pihak pemerintah yang menyebabkan kegiatan atau aktifitas perekonomian sudah berjalan normal, seperti aktifitas pedagang dan petani di kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Walaupun aktifitas perekonomian berjalan normal pemerintah masih memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pasca pandemi dalam pemulihan aktifitas ekonomi.

Program yang sepertini secara internasional dikenal sebagai program *Conditional Cash Transfers (CCT).* atau dengan kata lain bantuan tunai

3https://www.liputan6.com/news/read/4964641/jokowi-umumkan-masyarakat-boleh-lepas-masker-ini-pernyataan-lengkapnya di akses pada 2 September 2022

bersyarat dan bantuan berupa sembako yang di bagikan kepada warga yang tercantum dalam data program penanganan dan tinjauan warga miskin. Penerimaan bantuan ini di lakukan setiap tiga bulan sekali atau triwulan dan setiap bulannya selalu diadakan pertemuan atau rapat peninjauan kembali pendampingan dan peserta PKH.

Jumlah penduduk di kecamatan Iv koto sebanyak 26.473 jiwa. Program Keluarga Harapan (PKH) mulai di laksanakan di Nagari Balingka Kecamatan IV koto Kabupaten Agam pada tahun 2013. Nagari Balingka merupakan salah satu desa dari Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang memiliki 465 jumlah rumah tangga dan 1.846 jumlah penduduk.

Tahun 2018 lalu dimana ada 457 data awal, sekarang karena perubahan dan perbaikan karena sudah ada yang dikategorikan mampu data itu berkurang menjadi 305 dari tiga jorong. kembali dinsos mengusulkan ulang perbaikan 305 data itu oleh dinas sosial ditahun 2022 ini.

Program pemerintah berupa bantuan sembako dan uang tunai yang sekarang masih bersifat konsumtif bagi penerima program program keluarga harapan supaya bantuan yang selama ini hanya berifat konsumtif menjadi konsumtif. karena hal ini peneliti inggin mengangkat judul penelitian yaitu: “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Perekonomian Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Pasca Covid-19 Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasi masalah ini sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah pasca Covid-19 masih bersifat konsumtif
2. Evaluasi Pemulihan Ekonomi melalui kebijakan pemerintah pasca Covid-19 Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam agar lebih maksimal
3. Kebijakan yang diterapkan masih serupa pada masa pandemi belum ada nya perubahan dimasa endemi ini.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Perekonomian Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Pasca Covid-19 Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?

D. Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang diidentifikasikan akan di teliti. Untuk itu maka peneliti memberi batasan masalah, penelitian ini dilakukan hanya pada kebijakan pemerintah dalam pemulihan perekonomian melalui program keluarga harapan (PKH) pasca Covid-19 di kecamatan IV Koto kabupaten Agam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Memberikan informasi kepada Masyarakat tentang strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang dilakukan pemerintah IV Koto, kabupaten Agam.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada UIN Bukittinggi dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan maupun pengetahuan penulis mengenai strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak pemerintah yang terkait atau berwewenang dalam pengambilan keputasan untuk perekonomian masyarakat.

c. Bagi pembaca dan masyarakat

Sebagai tambahan ilmu yang memberikan kontribusi terhadap pandangan pembaca strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19

F. Penjelasan Judul

Dalam pembahasan ini penulisan tentu harus memberikan penjelasan pada penelitian ini untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas, dimaksud dengan judul ini. Judul dari penelitian ini adalah strategi pemulihan ekonomi pasca pendemi Covid-19 di kecamatan IV kabupaten Agam.

1. Perekonomian

Perekonomian adalah segala sesuatu tata caca dalam perekonomian (indusrti dan perdagangan). Perekonomian adalah serangkaian besar

kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membatu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.[4]

3. Program keluarga harapan

Program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat

4. Covid-19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar

4https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html diakses pada 5 september 2022

biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).[5]

Maka penjelasan judul kebijakan pemerintah dalam pemulihan perekonomian melalui program keluarga harapan (PKH) pasca Covid-19 di kecamatan IV Koto kabupaten Agam. adalah.pedoman atau dasar perencanaan pemerintah dalam memenuhi keinginan maanusia setelah kejadian penyebaran virus memalui program penerima manfaat bantuan.

G. Sistimatika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan antara lain :

1. BAB I : PENDAHULUAN Terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, , rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.
2. BAB II : LANDASAN TEORI Terdiri dari : Pengetian Perekonomian, Pengerian Konsumsi, pengertian program keluarga harapan,covid-19
3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Terdiri dari : jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data, informan, dan teknik analisis data.

---

5 https://kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html diakses pada tanggal 5 september 2022

4. BAB IV : HASIL PENELITIA Terdiri dari : gambaran umum penelitian, Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Perekonomian Melalui Program Keluarga Harapan.
5. BAB V : PENUTUP Yang Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetian Perekonomian

Untuk mengerti apa pokok persoalan ekonomi, kita berpangkal dari dua kenyataan ini :

1. Untuk dapat hidup layak, kita membutuhkan serta menginginkan bermacam-macamhal : makanan, minuman, pakaian, rumah, obat, pendidikan, dan lain-lain. KEBUTUHAN (*needs*) manusia banyak dan beraneka ragam sifatnya. Apalagi keinginan (*wants*) boleh dibilang tak ada batasnya.
2. Tetapi sumber-sumber, sarana atau alat-alat yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu, termasuk waktu yang tersedia, itu terbatas atau langka, artinya kurang dari yang kita butuhkan atau kita inginkan, baik dalam hal jumlah, bentuk, macam, waktu dan tempat.

Dari dua kenyataan pokok tersebut timbullah pokok persoalan ekonomi yaitu : bagaimana dengansumber-sumber yang terbatas orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang banyak dan beraneka ragam itu.

Pokok persoalan tersebut dihadapioleh perorangan, keluarga, perusahaan,dan koperasi, bangsa dan negara sebagai keseluruhan,bahkan oleh dunia internasional.

Untuk menanggapi persoalan itulah, maka timbul kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi, yang diatur oleh suatu cara berfikir dan cara bertindak yang disebut ekonomis atau menurut prinsip ekonomi.[6]

Sebuah rumah tangga dihadapkan pada begitu banyak keputusan yang harus diambil. Setiap rumah tanngga harus menentukan siapa yang harus mengerjakan apa dan imbalannya apa yang pantas diperolehnya; siapa yang harus memasak? Siapa yang harus mencuci dan mnyetrika pakaian? Siapa yang paling berhak memperoleh hidangan ekstra pencuci mulut usai makan malam? Atau, siapa yang boleh memilih saluran televisi yang hendak ditonton seluruh keluarga? Singkatnya, setiap rumah tangga harus mengalokasikan sumber-sumber dayanya yang langka ke segenap angotanya, dengan memperhitungkan kemampuan, daya upaya, dan keinginan dari setiap anggota tersebut.[7]

Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap keluarga adalah bagaimana dengan penghasilan yang masuk dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga (baik saat sekarang maupun yang akan datang)?, atau bagaimana menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran? Bagi setiap keluarga hal ini menjadi masalah. Entah karena penghasilan memang kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu banyak. Entah karena kebutuhannya begitu besar (atau ada kebutuhan mendadak) padahal

---

6 T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*,(Yogyakarta:KANISIUS,2004) h. 15

7 N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi kedua jilid 1*, (Jakarta : Erlangga, 2003)

penghasilannya tetap. Bisa juga karena tidak pandai mengatur uang walaupun sebenarnya penghasilannya cukup.[8]

Yang dihitung sebagai penghasilan keluarga adalah sebagai bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas-jasa atau sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Konkretnya penghasilan keluarga dapat bersumber pada:

1. Usaha sendiri
2. Bekerja pada orang lain
3. Hasil dari milik

Penghasilan keluarga atau uang masuk itu sebagian besar dikeluarkan lagi, yaitu untuk membeli segala hal yang diperlukan untuk hidup. Dengan istilah ekonomi dikatakan : dibelanjakan untuk konsumsi. Konsumsi tidak hanya mengenai makanan saja, tetapi mencakup semua pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan hidup.

Sebetulnya besar kecilnya penghasilan itu sangat relatif dan tidak bisa dipakai sebagai ukuran yang pasti untuk makmur tidaknya suatu keluarga. Karena bisa terjadi penghasilaninya besar tetapi masih juga hutang sana-sini. Sebaliknya walaupun penghasilannya kecil,tetapi cukup dan tidak punya hutang. Oleh karena itu, keadaan ekonomi rumah tangga yang sehat tidak pertama-tama ditentukan oleh banyaknya penghasilan (uang), melainkan oleh kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan dan mengendalikan pengeluarannya.[9]

8 T. Galariso, Op Cit, h.61
9 Ibid, h.65

Ibnu Khaldun telah memberikan definisi bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan kesejahteraan individu.

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam sendiri secara garis besar dapat kita jelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Kebebasan individu; Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
2. Hak terhadap harta; Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar; Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
4. Kesamaan sosial; Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi dia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh

sekelompok tertentu masyarakat saja. Selain itu sangat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunya peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan aktifitas ekonomi.

5. Jaminan sosial; setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara islam; dan setiapwarga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokok masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi setiap negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, tanpa kecuali muslim atau nonmuslim, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”. Dan terdapat persamaan sepenuhnya diantara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.
6. Distribusi kekayaan secara meluas; Islam mencegah penumpukan kekyaan padakelompokkecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepadda semua lapisan masyarakat.
7. Larangan menumpuk kekayaan; sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidakbai tersebut supaya tidak terjadidalam negara.
8. Kesejahteraan individu dan masyarakat;Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapisatu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.[10]

10 Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* 2,(Pekanbaru: Al-Mujtahad Press,2010) h.22

Banyak ayat al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja danusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.[11]Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang- orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.[12]

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial.Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosila adalah membrantas kemiskinan masyarakat, pembrantasan kelaparan dan kemelaratan.[13]Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt, kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagai kholifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah Swt mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan ummat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.[14]

---

11 Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2004),h.62.
12 Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.29.
13 Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PREES, 2007), h.6.
14 M. Said, Op.Cit, h.8

B. Konsumsi

1. Pengerian Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to consume* yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan.[15]

Konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan, apabila pendapatan meningkat maka konsumsi akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan turun maka konsumsi akan turun.

Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling penting menentukan diantaranya tingkat pendapatan rumah tangga.

Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa.[16] konsumsi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk

15 Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014) h.93
16 Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*,hlm. 163

memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan.

Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen bukan hanya digolongkan menjadi barang mewah dan barang tidak mewah, tetapi dapat juga dibagikan menjadi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tergolong bukan untuk kebutuhan pokok.[17]

2. Konsumsi Dalam Islam

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrim, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat keluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal.[18]

Menurut Yusuf al – Qardhawi konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Menurut Yusuf al- Qardhawi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, diantaranya: konsumsi pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi utang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran.

---

17 Soeharno, *Teori Mikroekonomi*,(Yogyakarta: C.V Andi Offset,2007) hal. 6

18Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi.*,hlm. 97-98

Menurut M. A. Manan, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.

Konsumsi merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini (Sedangkan dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedenostik-materialistik, individualistik, dan boros.

Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Ia merupakan tujuan yang penting, karena sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup seseorang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah "saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapa pun sepanjang anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum". Teori perilaku konsumen yang Islami dibangun atas dasar syariah Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: Prinsip Keadilan, Prinsip

Kebersihan, Prinsip Kesederhanaan, Prinsip Kemurahan Hati, dan Prinsip Moralitas.

Makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Pemanfaatan konsumsi secara berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang disebut dalam Islam dengan istilah isyraf (pemborosan) atau tabzir (menghabur-hamburkan harta tanpa guna). Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syari'at.

Konsumsi dalam syari'ah tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram saja, tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, tidak menjijikan.[19]

Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka, dalam berperilaku dikondisikan untuk saling menghargaidan menghormati orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yangmempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Perilaku

19Abdurrohman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Kudus, 2013

konsumsi dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikologi orang lain.

C. Program keluarga harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.[20]

Program Keluarga Harapan adalah program perindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban tarkait pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi berikutnya agar dapat keluar dari kemiskinan. PKH bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin (RTM) mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksud sebagai upaya membangun sisitem perlindungan social kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.[21]

---

20 https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1 diakses pada tangal 5 september 2022

21 Baiq Reinalda Triyunarni Dkk, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan, Jurnal Ilmu Administrasi Public Vol. 7 No. 2 September 2019,

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan keluarga harapan adalah mengacu pada peraturanMentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 2 yaitu:

a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KMP) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (perubahan perilaku) seperti taat dalam melakukan ibadah dan menghidari perbuatan yang menyimpang seperti maling, mencuri dan lain sebagainya.
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.[22]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, untuk membantu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, menciptakan perubahan perilaku, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan mapun

22 Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2, Diakses Pada 6 september 2022, Pukul 10:03

memperkenalkan manfaat dan jasa keuangan formal pada masyarakat miskin.[23]

3. Sasaran Penerima Keluarga Harapan (PKH)

Adapun sasaran dari Program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6(enam) tahun. Komponen pendidikan dengan kriterian anak SD/MI, atau SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan social dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.[24]

4. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:[25]

a. Bantuan sosial PKH
b. Pendamping PKH
c. Pelayanan di fasilitasi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial

23 Baiq Reinalda Triyunarni Dkk, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan, Jurnal Ilmu Administrasi Public Vol. 7 No. 2 September 2019.

24 Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 dan Pasal 5, Diakses Pada 6 september 2022, Pukul 11:03

25 Baiq Reinalda Triyunarni Dkk, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan, Jurnal Ilmu Administrasi Public Vol. 7 No. 2 September 2019

d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban:[26]

a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
c. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling
d. sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

D. Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory

26 Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 7, Diakses Pada 6 september 2022, Pukul 13:03

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).[27]

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome* corona virus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistempernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu corona virus, Covid-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala Pengaruh pandemic Covid-19 berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, terutama pada sektor perekonomian yaitu penurunan produktifitas.[28]

E. Kajian terdahulu

Table penelitian terdahulu

No	**Nama peneliti**	**Tahun**	**Judul Penelitian**	**Hasil Penelitian**
1	Arina Luthfiana dan Alip Sugiannto	2020	Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-	Pada Tahun 2020 merupakan awal tak terduga bagi hampir tiap negara untuk menangani krisis dari berbagai sektor yang presentasenya menurun drastir. Berbagai upaya yang dikerahkan pmerintah mulai dari pemberlakuan pembatasan

27 https://kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html diakses pada tanggal 5 september 2022

28 Nazwa Dwi Archika, "Corona Virus Disease 2019", Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, Medan, 2020, hlm 6.

			19 di Indonesia	sosial dan memfasilitasi masyarakat untuk karantina merupakan bentuk dari pencegahan agar kondisi negara kembali pulih.[29]
2	M. Ali Nasrun	2020	Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu yang kaya akan sumber daya alam, serta masyarakatnya yang mayoritas sebagai petani dalam arti luas dan pertambangan, maka strategi pemulihan ekonomi adalah mengandalkan sektor pertanian dan usaha rakyat pada komoditi yang layak bisnis, mengembangkan perdagangan dan pasar lokal, penerapan teknologi informasi, serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).[30]
3	Edy Sutrisno	2021	Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm Dan Pariwisata	Seluruh dunia terkena dampak akibat pandemic Covid-19 diperkirakan 25 juta orang diseluruh dunia kehilangan pekerjaaan karena olengnya UMKM, menurunnya kuantitas ekspor dan impor, terganggunya pergerakan moda transportasi, penurunan jumlah wisatawan, juga obligasi dan pasar saham ikut terganngu.[31]

29 Arina Luthfiana dan Alip Sugiannto, *Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia,* Seminar Nasional Potensi dan Kemandirian Daerah: Optimalisasi Potensi Sumber Daya Ekonomi Menuju Kesejahteraan Daerah,2022

30 Ali Nasrun, *Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu* Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 isbn, 2020

31 Edy Sutrisno, *Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm Dan Pariwisata* Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Volume 9 n o 1, 2020

4	Nurul Hanifa dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah	2021	Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19	Dari pemaparan kajian analisis ekonomi publik di atas melalui peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi regulasi, administrasi maupun implementasi yang ada di lapangan.[32]
5	Andi Setyo Pambudi dkk	2021	Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19	Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ruang gerak masyarakat dunia adalah bencana bagi sektor pariwisata, termasuk Indonesia. Pembangunan pariwisata dipaksa untuk beradaptasi dengan pandemi yang diterjemahkan pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan new normal.[33]

32 Nurul Hanifa dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, *Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, Welfare Jurnal Ilmu Ekonom, Volume 2 Nomor 1 (Mei 2021)

33 Andi Setyo Pambudi dkk, *Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19*, Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, Volume 1 No. 1 Oktober 2020

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode *field researc* (penelitian lapangan). Yaitu penelitian yang dilakukan karena penelitian turun ke lapangan atau ke lokasi lapangan. Lebih khususnya, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba mengambarkan, memaparkan dan menafsirkan suatu fenomenayang terjadi pada saat ini.[34] Karna itu penulis mengambarkan, memaparkan dan menafsirkan tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Perekonomian Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Pasca Covid-19 Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Untuk mendapatkan data dam informasi yang sesuiai serta relevan dengan tema penelitian ini, maka lokasi penelitian ini adalah di kemacatan IV Koto kabupaten agam

2. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan pada tangga 1 september 2022 sampai selesai. Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

34 Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* **(**Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995). cet ke-5, hal 3

C. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti lansung dari narasumber atau responden. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek untuk mencari data di tempat penelitian.[35]

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari wawancara dengan anggota program keluarga harapan yang menerima bantuan dari pemerintah pasca covid-19 di kecamatan IV koto.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan atau data primer yang telah diolah menjadi suatu kerangka yang sistematis.[36]

Data sekunder juga merupakan jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang di keluarkan diberbagai informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

---

35 Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 82

36 Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 83

Dalam penelitian ini data sekunder di dapatkan dari dokument-dokument terkait.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian.Informan yang dipilih memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan adalah pendamping program keluarga harapan kecamatan IV koto dan anggota program keluarga harapan yang menerima bantuan dari pemerintah pasca covid-19 di kecamatan IV koto.

E. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada responden. Wawancara ini dilakukan secara terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan sedangkan informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawabannya.[37]

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Penulis mengunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data tentang

37 Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta:Ar-RuzzMedia,2014), hal 92

letak geografis, jumlah masyarakat desa, keadaan desa dan keadaan sarana. Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa dan bagaimana.

3. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung baik terhadap lokasi penelitian secara umum,maupun keadaan responden itu sendiri.[38] Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia,seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dengan metode lain.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang telah didapatkan, kemudian diolah untuk akan dapat di interprestasikan sehingga menggambarkan fenomena yang ada dilapangan dan dapat memberikan kesimpulan dalam penelitian ini.[39]

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interviu, observasi, kutipan, dan sari dari

---

38Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*,(Bandung:Alfabeta), 2011, hal 226

39Andi mappiare AT. 2009. *dasar-dasar metodologi riset kualitatif untuk ilmu social dan profesi*,(Malang: Jenggala Pustaka Utama), hal. 80

dukume, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data terebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan.[40]

Proses analisis yang dilakukan oleh teknik Miles dan Huberman sebagai berikut:

a. Reduksi data

   Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diverivikasikan.

b. Data Display

   Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.kondisi demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahakan yang bersangkutan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu text naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.[41]

c. Verifikasi/Kesimpulan

   Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

40Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungann,* (Jakarta: Prenadameia Group),2014, hal 407

41 Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungann,* (Jakarta: Prenadameia Group),2014, hal 408

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Nagari Balingka

Balingka adalah satu negeri pergunungan yang terletak di lereng Gunung Singgalang dan dilingkungi oleh bukit barisan yang membujur dari Barat, membelintang di Selatan sampai di Timur.

Hawanya dingin seolah-olah Zwinerland Van Minangkabau dan Iklimnya yang ketinggian menimbulkan semangat perantauan bagi Penduduknya yang senantiasa dihibur, dijanjikan oleh nyanyian dendang air Sungai dari Singgalang yang hendak merantau turun ke laut.

Dihati masyarakatny tertanam semangat cinta pada Negeri dengan sesubur-suburnya, sebagai bawaan romantis alamnya yang dingin dan tenang, kecintaan mereka tertambat antara Bukit Barisan dan Singgalang, walau sejauh-jauh merantau, namun jiwa mereka terpikat pada Negerinya.

Tabiat Perantauanlah agaknya yang memaksa Penduduknya tidak senang berdiam diri untuk menciptakan kemajuan yang selaras dengan Zaman; mereka dapat pengalaman dari tepian dan lubuk yang telah dijenguknya buat menjadi teladan bagi kejajaan Negeri itu.

BALINGKA asalnya terdiri dari Tiga jorong (Kampung) yaitu KOTO HILALANG, PAHAMBATAN, dan SUBARANG SIANOK. Pada tahun 1908 nama BALINGKA belum lagi dikenal sebagai nama Negeri, karena

Penghulu Kepala, masih dua orang, yakni : 1 buat Koto Hilalang dan 1 lagi buat Pahambatan dan Subarang Sianok.

Dan pada tahun 1916, terjadilah satu kerapatan di kantor KAN yang dihadiri oleh penghulu-penghulu Koto Hilalang, Pahambatan dan Subarang Sianok.

Dalam Kerapatan itu diputuskanlah, bahwa kerena ketiga Negeri itu, mempunyai asal yang satu dan adat yang satu, maka Kerapatan setuju melebur Negeri ini menjadi satu. Dan sebagai kepala Negerinya ditetapkan Engku Dt. Maruhun Kayo dengan gaji 150 sebulan yang diambilkan dari Kas Nageri Balingka.

Di waktu persatuan telah tercipta, Penghulu-penghulu bertikai dalam mencari nama yang akan dipakai menjadi nama Persatuan.

Kata Orang Koto Hilalang: Negerinyalah yang asal, karena Koto Hilalanglah yang mula-mula dipancang oleh Nenek Moyang ketika mereka datang dari Paga Ruyuang. Dekat Pakan Selasa di Koto Tuo sekarang, disitulah dibuat mereka Perhentian baru mereka terus ke Koto Hilalang. Dari situ baru pindah ke Pahambatan. Demikianlah Koto Hilalang lebih tua dari Pahambatan, karena itu patutlah dia diambil nama Persatuan. Tetapi Niniak Mamak Pahambatan membantah keterangan ini, mereka berpendapat Bahasa Pahambatan lebih tua dari Koto Hilalang, karena Nenek Moyang dahulu datang dari sebelah Barat yaitu: Maninjau, Malalak, Pariaman dan lain-lain. Tentu saja mereka ke Pahambaan lebih dahulu, maka sampai ke

Koto Hilalang. Jadi patutlah dia dijadikan nama Persatuan, karena dia yang paling tua.

Dalam pertikaian faham ini, timbulah pikiran oleh beberapa orang Niniak Mamak untuk mencari perdamaian dengan menolak Kedua usul itu dan memajukan nama baru yaitu BALINGKA, nama satu tempat yang terletak sebelah Timur Negeri itu. Perselisihan yang diketakuti itu, menjadi tenang dan diam semua anak Negeri menerima keputusan dengan menamai Negerinya BALINGKA.

Dalam tahun 1916 itu juga dia telah mulai bekerja mendirikan Mesjid di Koto Hilalang, sebagai menyambung kerja Engku Dt. Pamuncak Marajo yang telah membuka Mesjid itu, tapi Beliau telah meninggal sebelum Mesjid itu ditegakkan kembali.

2. Kondisi Kependudukan

Balingka merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Nagari Balingka terletak pada kawasan strategis Nagari ini juga/desa ini juga merupakan jalan menuju jalan alternatif malalak sicincin di Padang pariaman dan malalak di Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Nagari Balingka memiliki luas 18.20 kilometer persegi,atau 26,48 persen dari luas wilayah Kecamatan IV Koto. yang terdiri dari 3 jorong, antara lain:

a. Subarang

b. Pahambatan

c. Koto Hilalang.

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
	Laki - laki	Perempuan		
2016	3.373	3.300	6.673	1.762
2017	3.380	3.303	6.683	1.766
2018	3.342	3.392	6.734	1.830

Sumber : Data Agregat Kependudukan Nagari Balingka

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No.	Golongan Umur (Tahun)	Tahun		
		2016	2017	2018
1	0 - 4	424	439	443
2	5 - 9	625	633	639
3	10 - 14	662	644	647
4	15 - 19	650	666	670
5	20 - 24	635	643	653
6	25 - 29	482	489	491
7	30 - 34	499	491	499
8	35 - 39	455	466	469
9	40 - 44	426	440	437
10	45 - 49	348	343	350
11	50 - 54	333	321	328
12	55 - 59	280	268	273
13	60 - 64	296	297	294
14	65 - 69	177	179	182

15	70 - 74	134	126	131
16	> 74	247	238	228
Jumlah		**6.673**	**6.683**	**6.734**

Sumber : Data Agregat Kependudukan Nagari Balingka

Berdasarkan tabel diatas Jumlah penduduk menurut kelompok umur, bisa kita ketahui bahwa jumlah penduduk tahun 2016 paling banyak berusia 10 – 14 tahun dan paling sedikit berusia 70 – 74 tahun, pada tahun 2017 jumlah penduduk paling banyak berusia 15 – 19 tahun dan paling sedikit berusia 70–74 tahun, sedangkan pada tahun 2018 penduduk pebusia paling banyak berusia 15 – 19 tahun dan yang paling sedikit berusia 70 – 74 tahun

c. Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan

No.	**Tingkat Pendidikan**	**JUMLAH**
1	Tidak Tamat SD/Blm Sekolah	2.398
2	SD	1.965
3	SLTP	1.231
4	SLTA	909
5	Diploma 1-2	29
6	Diploma 3	35
7	S1	158
8	S2	9
9	S3	0
Jumlah		**6.734**

Sumber : Data Agregat Kependudukan Nagari Balingka

d. Jumlah Penduduk Usia Produktif

No.	**Golongan Umur (Tahun)**	**Tahun**		
		2016	**2017**	**2018**

1	15 – 19	650	666	670
2	20 – 24	635	643	653
3	25 – 29	482	489	491
4	30 – 34	499	491	499
5	35 – 39	455	466	469
6	40 – 44	426	440	437
7	45 – 49	348	343	350
8	50 – 54	333	321	328
9	55 – 59	280	268	273
10	60 – 64	296	297	294
Jumlah		**4.404**	**4.424**	**4.464**

Sumber : Data Agregat Kependudukan Nagari Balingka

e. Jumlah KK Miskin Nagari Balingka Tahun 2016-2018

Tahun	**Jumlah KK Miskin**	**Kenaikan / Penurunan**	
		∑	**%**
2016	487	-	-
2017	510	23	4,72
2018	615	105	20,59

Sumber : Data Agregat Kependudukan Nagari Balingka

Berdasarkan tabel diatas jumlah KK miskin Nagari Balingka tahun 2016- 2018. Dapat diketahui jumlah KK miskin Nagari Balingka dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Tahun 2017 jumlah KK miskin Nagari Balingka mengalami kenaikan sebesar 4,72%, dan pada tahun 2018 jumlah KK miskin Nagari balingka mengalami kenaikan sebanyak 20,59%.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2018

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Tani	197
2	Petani/Peternak	1983
3	Pedagang	216
4	Buruh / Tukang	23
6	Penjahit	218
7	PNS	32
8	Pensiunan	15
10	Perangkat Desa	10
14	Lain-lain	20
Jumlah		**2.714**

Sumber : *Kantor Walinagari Balingka*

4. Gambaran Umum Demografis Nagari

a. Luas Wilayah

Luas Wilayah Nagari Balingka ± 1.820 ha, terdiri dari persawahan, perkebunan dan perkampungan. Daerah berbukit-bukit dengan ketinggian 1.100 mdpl.

b. Batas-batas Wilayah Nagari Balingka :

Nagari Balingka mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nagari Koto Panjang / Koto gadang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Malalak
- Sebelah Timur : Nagari Koto Tuo
- Sebelah barat: Nagari Sungai Landia

c. Lapangan Usaha :

Lapangan usaha penduduk secara umum adalah sebagai berikut :

1) Bertani….....75 %

2) Lain-lain….....25%

d. Luas Areal Pertanian Sawah :

1) Sawah irigasi Semi teknis….....317 ha

2) Sawah irigasi sederhana.....19 ha

3) Sawah tadah hujan….....8 ha

e. Luas Areal Perkebunan :

1) Ladang.....45 ha

2) Kebun….....198 ha

3) Tegalan….....231 ha

4) Perkarangan….....32 ha

5) Padang Rumput.....7 ha

f. Luas Areal Hutan

1) Hutan rakyat….....800 ha

2) Hutan Negara.....200 ha

g. Infrastruktur Nagari Balingka

No.	Jenis Prasarana dan Sarana Nagari	Jumlah	Kondisi
1	Kantor Wali Nagari	1	-
2	Kantor Camat IV Koto	1	-
3	Gedung SLTA	1	-
4	Gedung SLTP	1	-
5	Gedung SD	6	-
6	Gedung TK	4	-
7	Masjid	3	-
8	Mushalla	14	Perlu Perbaikan
9	Pukesmas Pembantu	1	-
10	Polindes	3	Perlu renovasi
11	MDA	8	-
12	Poskamling	7	-
13	BMT	1	Perlu renovasi
14	Kantor Wali Jorong	1	Perlu penambahan

Sumber : Kantor Wali Nagari Balingka

5. Kondisi Pemerintahan Nagari

a. Pembagian Wilayah Nagari

Nama – nama Jorong yang ada di Nagari Balingka :

1) Jorong Koto Hilalang
2) Jorong Pahambatan
3) Jorong Subarang

Nagari Balingka menganut Sistem Kelembagaan pemerintah Nagari dengan Pola Minimal sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2016, selengkapnya sebagai berikut :

1) Wali Nagari
2) Sekretaris
3) Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra)
4) Kepala Seksi Pemerintahan
5) Kepala Seksi Pelayanan
6) Kepala Urusan Keuangan/ Bendahara
7) Kaur Perencanaan
8) Kaur Tata Usaha dan Umum
9) Wali Jorong

b. Lembaga – lembaga Nagari

1) Badan Musyawarah Nagari

Badan Permusyawatan Nagari atau disingkat BAMUS Nagari merupakan lembaga perwakilan masyarakat dari berbagai unsur yang menjadi mitra bagi pemerintah nagari dalam menyelenggarakan

urusan yang menjadi kewenanganya bagi :

- Unsur Ninik Mamak
- Unsur Cadiak Pandai
- UnsurBu

  ndoKand

  uag
- Unsur Alim Ulama
- Unsur Pemuda

2.) Lembaga Nagari

Lembaga Nagari merupakan mitra pemerintahan nagari dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan bidangnya, anggotanya dipilih dari masyarakat yang di pandang mampu untuk melaksanakan berbagai program guna kepentingan masyarakat diantaranya:

a) Kerapatan Adat Nagari (KAN)
b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
c) PKK
d) Bundo Kanduang
e) Parik Paga Nagari
f) Majlis Ulama Nagari (MUI-Nagari)
g) KSB
h) LPTQ
i) FKPM

6. Potensi Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Balingka yaitu sebagai berikut:

1) Mempunyai struktur organisasi pemerintahan yang lengkap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai tupoksi masing-masing.
2) Wali Nagari maupun perangkat mempunyai pengalaman yang cukup dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
3) Perangkat Nagari dalam melaksanakan pelayanan dengan sistem komputerisasi dan perangkat nagari yang ada rata-rata menguasai pengoperasionalan komputer sehingga pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
4) Tersedianya SOP agar mampu memberikan pelayanan yang prima.
5) Tersedianya pembagian tugas, masing-masing perangkat dan Kepala Jorong sehingga memudahkan perangkat dalam menjalan tugas-tugas pemerintah.
6) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini dalam proses penyelesaian pembangunan
7) Sudah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan rasa bernagari

8) Tersedianya data base yang lengkap dan Valid.

9) Adanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Nagari dengan lembaga-lembaga Nagari.

10) Tersedianya Struktur lembaga Nagari yang memadai.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan adanya perencanaan Nagari yaitu

1) Adanya perencanaa pembangunan yang baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Nagari.
3) Terselenggaranya Musrenbang Nagari sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam perencaan pembangunan yang partisipatif.
4) Adanya Rencana Kerja Pertahun (RKP) Nagari Balingka sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Nagari dalam satu Tahun.
5) Tingginya harapan masyarakat Balingka untuk kemajuan Nagari.
6) Adanya partisipasi masyarakat untuk membebaskan tanahnya untuk pembangunan Nagari.
7) Tingginya partisipasi masyarakat untuk bergotong royong.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

1.) Adat, Budaya dan Agama

a) Adanya inisiatif masyarakat untuk mengembalikan nilai

sosial budaya masyarakat dalam tatanan kehidupan dengan membentuk Parik Paga Nagari, Majelis Ulama Nagari.

b) Tingginya keinginan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kegiatan keagamaan seperti majelis Taklim, Kegiatan Remaja Mesjid, dan kegiatan keagamaan lainnya.

c) Adanya inisiatif masyarakat untuk melestarikan adat kehidupan bernagari dan bermasyaraka berupa pelatihan Pasambahan.

d) Tersedianya pemangku adat (Datuk) dalam jumlah yang cukup banyak yaitu 36 orang.

e) Adanya Aturan adat salingka Nagari yang disusun oleh Kerapatan Adat Nagari Balingka.

f) Ada 3 Mesjid dan 14 Mushalla di Nagari Balingka sebagai sarana ibadah bagi masyarakat .

g) Tingginya keinginan masyarakat untuk melestarikan adat istiadat yang ada di Nagari.

2.) Perantau

a) Banyaknya anak Nagari Balingka yang merantau baik diseluruh kota Indonesia dan Luar Negeri yang sangat potensial untuk membangun Nagari baik secara moril maupun materil.

b) Adanya lembaga-lembaga yang mewadahi perantau yaitu IKB (Ikatan Keluarga Balingka).

c) Tingginya partisipasi perantau dalam kegiatan pembangunan di Nagari.

d) Tingginya partisipasi masyarakat dalam membantu masyarakat baik melalui Nagari atau langsung kepada masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

1) Tersedianya Lembaga Pendidikan dari TK, SD, SMA untuk meningkatkan SDM generasi muda

2) Tingginya Partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah seperti Penyediaan Lahan.

3) Tingginya motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan.

4) Tingginya dukungan masyarakat baik yang dikampung maupun yang diperantauan terhadap pendidikan dalam penyediaan Tanah untuk pembangunan sarana sekolah.

5) Tersedianya lembaga penunjang pendidikan dasar Agama seperti MDA/TPA/DTA.

e. Pemberdayaan Perempuan

1) Adanya lembaga organisasi wanita seperti Bundo Kanduang dan PKK dalam menampung dan mengkoordinir setiap kegiatan ibu-ibu yang ada di Nagari.

2) Adanya kegiatan majelis Taklim yang dikelola oleh Ibu - ibu dalam wadah BKMT.
3) Adanya Kader Posyandu Balita dan Lansia di Jorong-jorong.

f. Pemuda
1) Adanya lembaga pemuda dalam bentuk Lembaga Parik Paga Nagari yang membantu pemerintahan nagari dalam bidang keamanan Nagari yang bekerjasama dengan Babin Nagari.
2) Adanya Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang membantu Pemerintahan Nagari dalam penganggulangan bencana baik yang terjadi di Nagari Balingka maupun diluar Balingka sendiri.
3) Tingginya minat pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
4) Tersedianya Sarana olah raga seperti Lapangan Bola, bulu tangkis.

g. Kesehatan
1) Tingginya keinginan masyarakat Nagari Balingka untuk mewujudkan Lingkungan yang bersih dan sehat.
2) Tersedianya sarana Kesehatan berupa Puskesmas Pembantu, dan Polindes
3) Tersedianya sarana Posyandu Balita dan lansia yang aktif untuk pelayanan kesehatan dan monitor kesehatan ibu dan anak dan Lansia.
4) Cukupnya jumlah kader posyandu di tiga Jorong yang ada.

h. Pertanian dan Peternakan

1) Tersedianya lahan pertanian yang mendukung untuk ditanami seperti tanaman holtikultura.
2) Mempunyai potensi sumberdaya Alam yang dapat dikembangkan untuk pertanian, peternakan
3) Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah bertani
4) Adanya beberapa Kelompok Tani sebagai pelaksana kabijakan pengembangan pertanian.
5) Adanya lembaga Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai wadah gabungan Kelompok Tani

7. Visi Dan Misi Nagari Balingka

a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang ingin diperoleh dengan melihat kemampuan dan kebutuhan yang dimiliki Nagari. Pembuatan visi Nagari Balingka ini dibuat dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang bekepentingan di Nagari Balingka seperti pemerintah yang ada di Nagari, Bamus, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Nagari dan masyarakat Nagari pada umumnya. Dari musyawarah tersebut dihasilkan visi Nagari Balingka yaitu :

“BALINGKA JAYA, POTENSI, DAN

TERDEPAN BERBASIS IMAN

DAN TAQWA”

Visi Nagari Balingka dimasud merupakan Inti Sari dari seluruh

paradigma yang dituangkan dalam rumusan “Mambangkik Batang Tarandam, Babaliak Banagari, Bak Nagari Balingka Dahulunyo” , dengan pandangan sebagai berikut :

1) Balingka adalah Nagari dengan segala komponen yang dimiliki serta seluruh masyarakat yang hidup didalamnya.
2) Jaya adalah puncak keberhasilan yang dicapai dalam peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berbudaya.
3) Potensi adalah bermanfaatnya seluruh aset yang ada di Nagari Balingka dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Alam yang ada untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat.
4) Terdepan adalah menjadikan Nagari Balingka yang lebih maju, berkembang dari semua aspek.
5) Berbasis Iman dan Taqwa adalah pencapaian tujuan dilakukan dengan rasa saling memiliki, tanggung jawab dan penuh keikhlasan sesuai dengan ajaran agama islam.

b. Misi

Selain pembuatan visi juga dibentuk misi-misi yang di dalamnya berisikan tuntutan yang harus dilaksanakan bagi Nagari supaya sejalan anatar visi dan misi yang di buat.

Misi dari Nagari Balingka yaitu :

1) Mewujudkan pemerintah Nagari yang tetap mengoptimalkan

pelayanan kepada masyarakat

2) Memberdayakan masyarakat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan.
3) Menciptakan ketentraman ketertiban yang kondusif di masyarakat.
4) Memberdayakan potensi nagari dalam rangka peningkatan pendapatan.
5) Meningkatkan dalam bidang pelayanan kesehatan.
6) Meningkatkan sektor pertanian serta usaha industri kecil yang bewawasan lingkungan.
7) Mengembangkan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui dukungan Pogram Wajib belajar 9 tahun dan Pelatihan keterampilan.
8) Meningkatkan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari.

B. Program Keluarga Harapan Di Nagari Balingka

1. Sejarah PKH Di Nagari Balingka

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kemiskinan di nagari Balingka mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini memberikan bukti bahwa segala bentuk program pemerintah belum berjalan secara maksimal termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) bahkan pasca covid-19, Oleh sebab itu keefektifan suatu program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar dilakukan, penelitian. PKH di Nagari

balingka berlangsung sejak tahun 2013 di bentuk oleh pemerintah melalui kemensos (kementrian sosial) Dengan Pengawasan Nasional (BAPPENAS). Dalam UUD pasal 34 ayat 1 " Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara".

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.

b. Memulihkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian.

c. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

f. meningkatkan kualitas manajemen penyelengaraan kesejahteraan sosial.

Pada praktiknya peran pemerintah terhadap program dinas sosial dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat menentukan tingkat kesejahteraan perekonomian di nagari balingka.

Penyaluran PKH bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada dinegara ini. Melalui PKH pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar 75 bagi lansia diatas 70 tahun dan bagi penyandang disabilitas berat yang mana peraturan buat lansia termasuk baru diputuskan.[42] Bantuan ini tidak diberikan dengan cuma- cuma, penerima bantuan PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta penerima yang telah ditentukan oleh pemerintah Melaikan;

a. Lansia

b. disabilitas

c. Anak Sekolah SD, SMP, SMA

d. ibu hamil

e. anak balita

Syarat peertama harus terdaftar DTKS yang di usulkan oleh nagari, jika di setujui kemensos maka dilakukan survey oleh pendamping PKH melihat

42 Wawancara ibuk selvy anggrayni, Pendamping PKH Nagari Balingka, pada (senin, 30 januari 2023, Pukul 09:00 WIB)

kondisi ekonomi dan kondisi tempat tinggal, bila layak barulah diterma sebagai anggota PKH.[43]

Pendamping PKH Nagari Balingka silvy anggryni menyatakan: “program PKH di nagari balingka sudah berjalan dengan baik, berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan program yang telah berjalan”

2. Penerima PKH dan Kewajiban Peserta PKH

Di jelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yangterkait dengan kesehatan dan pendidikan serta dalam pemberdayaan ekonomi. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemeberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu. Peserta PKH juga memiliki kewajiban terkait dengan pendidikan yang lebih baik. Dalam kehadirannya juga harus efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Berikut kutipan wawancara dengan ,pendamping program keluarga harapan di Nagari Balingka :

Pertanyaan:sejak kapan PKH di berlakukan di nagari balingka dan kapan ibuk di pilih menjadi pendamping PKH di Nagari balingka?

43 Pedoman Operasional PKH, hal. 4-5

Pendamping: *untuk PKH sendiri dibentuk oleh dinas sosial di nagari balingka sejak tahun 2013, untuk saya sendiri bergabung sejak tahun 2018 menjadi pendamping PKH di nagari,persatu nagari ada 5 pendamping tergantung jumlah jorong dan jumlah perserta PKH.*

Pertanyaan: apa saja syarat menjadi anggota pkh? Apakah lansia juga termasuk syarat nya?

Pendamping: *Syarat peertama harus terdaftar DTKS yang di usulkan oleh nagari, jika di setujui kemensos maka dilakukan survey oleh pendamping PKH melihat kondisi ekonomi dan kondisi tempat tinggal, bila layak barulah diterma sebagai anggota PKH diantara nya balita,ibu hamil,lansia,berkebutuhan khusus dan anak sekolah.*[44]

Jumlah RTM Penerima Program Keluarga Harapan di Nagari Balingka 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah kk	220	260	343

Keumudian jika dalam satu keluarga ada kriteria komponen penerima yang sudah tidak termasuk kategori penerima biasanya peserta PKH tersebut akan dihilangkan. Namun tetap mendapatkan bantuan PKH sesuai kreteria yang masih ada atau yang termsuk dalam penrima PKH. Untuk itu biasanya dilakukan

44 Wawancara ibuk selvy anggrayni, Pendamping PKH Nagari Balingka, pada (senin, 30 januari 2023, Pukul 09:00 WIB)

kegiatan survie dalam pendataan penerima PKH yang dilakukan oleh pendamping walaupun ada pertemuan rutin pendataannya dikontrol dua kali dalam setahun.

Pertanyaan: apa saja program dari pemerintah sejak PKH ini dijalankan?

Bagaimana respon KPM atas program tersebut apakah terdapat kendala?

Pendamping: *yang pertama yaitu KUBE kelompok usaha bersama salah sata diantara nya yaitu kelompok tani, anggota di bekali dana untuk mengelola berbentuk kebun cabe,buncis,dll hasil laba di bagi peranggota.program yang kedua yaitu P2K2 yaitu program peningkatan kemampuan keluarga. Untuk P2K2 sangat di respon baik karena disini terdapat materi bagaimana pola asuh anak yang tidak pernah didapat sebelum nya oleh KPM dan juga di arahkan bagaimana cara mengelola keuangan dalam rumah tangga, Beda dengan program KUBE terdapat berbagai kendala karena masing-masing KPM mempunyai heahlian yang berbeda sedangkan pengelolaan usaha nya yang sama.*

Namun sekarang masyarakat pun sudah cukup cerdas yang mana ketika ada dilakukan survei sehingga terkadang bisa menutupi keadaan atau kondisi rumah tangga masyarakat. Jadi di Nagari Balingka itu sendiri jika ada salah satu anggota PKH atau satu keluarga yang menerima PKH ternyata sudah lulus atau tanggungan untuk menerima PKH itu selesai maka akan dinyatakan dana PKH nya diputuskan. Dan diganti dengan keluarga miskin yang lain dengan

cara menysurvie ke rumah-rumah yang namanya sudah dicantumkan di data dari pusat atau yang berhak menerima PKH.

Maka dapat dilihat secara sederhana dengan melihat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan sasaran PKH di Nagari balingka yaitu :

1. Pendapatan rumah tangga, hal ini didasarkan karena tingkat pendapatan masyarakat per kapita yang dimasukan dalam indicator kemiskinan. Jadi kemiskinan memang terhapus dengan adanya tingkatan pendapatan masyarakat dengan itu dapat sebagai titik tolak atau modal bagi perkembangan ekonomi selanjutnya.
2. Pengeluaran rumah tangga, hal ini karena tingkat kemiskinan diukur dengan melihat pada sisi pengeluaran masyarakat. Karena BPS menggunakan definisi penduduk miskin sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
3. Kepemilikan asset, kepemilikan asset ini juga berkaitan dengan dengan sejauh mana asset-aset pribadi yang dimiliki. Karena pengentasan kemiskinan tidak selamnya berasal dari kebijakan saja melainkan juga persoalan yang sifatnya structural, yang mana artinya seseorang yang berusaha sekeras apapun maka hasilnya tidak ada artinya karena kendala struktural yang dihadapi. Contohnya saja keterbatasan infrastruktur (aset) yang memadai dan dapat menunjang kebutuhan hidup mereka.
4. Kondisi rumah, kondisi rumah disini dimaksudkan adalah berupa gabungan antara indicator yang terdiri dari status kepemilikan rumah, kondisi dinding, lantai ,tempat BAB dan penggnaan bahan bakar. Dengan

demikian untuk sasaran penerima di Nagari Balingka sudah berusaha maksimal namun dalam data yang didapatkan dari pusat tidak sesuai dengan kenyataan dikarena kurangnya komunikasi. Di Nagari Balingka sendiri ada sekitaran 480 RTSM yang harus[45] berhak mendapatkan PKH karena pendapatan nya dibawah garis kemiskinan dan termasuk dalam indicator diatas. Namun dalam kenyataanya dalam sasarannya hanya terdapat 343 RTSM yang mendapatkan PKH tersebut. Jadi disini sasarannya belum sesuai atau belum tepat.

C. Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian KPM

Pasca pandemi covid program yang dijalankan masih sama dengan pada biasanya, dari pemerintah pun tidak ada program khusus guna mencegah perekonomian KPM[46]. Namun pemerintah selalu perupaya melakukan optimalisi guna mendongkrak perekonomian. Beberapa langkah yang saat ini dijalani yaitu:

Penduduk nagari balingka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bergantung pada penghasilannya dari bertani. Penghasilan dari pencahari utama ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebuthan pokok sehai-hari. Hanya saja masih kurang memenuhi kebutuhan seperti perumahan yang layak ataupun sanitasi yang baik. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa keluarga sangat miskin masih memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka dalam status memiliki mata pencaharian karena pendapatan

45 Wawancara dengan Bapak Resman selaku Koordinator PKH, padal (rabu, 1 februari 2023, Pukul 11:00

46 Wawancara ibuk selvy anggrayni, Pendamping PKH Nagari Balingka, pada (senin, 30 januari 2023, Pukul 09:00 WIB)

yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk memenuhi semuanya. Hadirnya program penegntasan kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu meringankan beban hidup mereka meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh PKH karena PKH hanya diberikan kepada mereka ibu hamil dan anak belita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka serta memberikan kesehatan terhadap lansia juga.

Kemudian pada anak sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Namun adanya bantuan tersebut dapat meringkankan beban si miskin, karena mereka tidak perlu lagi menyisihkan pendapatan mereka untuk anak sekolah mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat digunakan memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari, pakain dan bahkan untuk keperluan tempat tinggal mereka. Berikut data hasil wawancara dengan beberpa masyarakat penerima bantuan PKH terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat.Berikut Hasil Wawancara dengan KPM jorong Subarang Nagari Balingka;

No	Informan	Pertanyaan	Jawapan

1	Sulastri	Bagaimanakah anda memenuhi kebutuhan pokok keluarga?	Kalau untuk makan ya seperti biasa saja yang sederhana yang penring bisa makan dan sesuai uang yang ada. Kalau untuk beras kan masih ada persediaan dari persawahan dan sebagian pendapatan digunakan untuk tambahan kebutuhan anak sekolah
		Apakah bantuan PKH ini sekiranya dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga ibu ?	Dengan adanya bantuan PKH ini alhamdulilah bisa membantu biaya anak sekolah dan jika sisah dapat memenuhi kebutuhan lainnya atau barang lainnya
2	yenti	Bagaimanakah anda memenuhi kebutuhan pokok keluarga ?	Kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok yang menggunakan hasil berkebun, tapi alhamdulilah bisa mencukupi
		Apakah bantuan PKH ini sekiranya dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga ibu ?	lihat sendiri keadaannya, sama saja. Saya juga mendapat program ini nominalnya tetap saja. Tapi seenggaknya bisa membantu biaya sekolah anak saya. Jadi saya tidak memikir tentang biaya sekolah.

3	Nurbaiti	Bagaimanakah anda memenuhi kebutuhan pokok keluarga ?	Kalau untuk makan ya menggunakan persediaan beras dari sawah jadi tinggal beli lauknya saja, tapi penghasilan yang tidak pasti ini kadang tidak cukup untuk memebeli kebutuhan lainnya. Petani kan penghasilannya pas musiman mbk. Apalagi saya mau renovasi rumah.
		Apakah bantuan PKH ini sekiranya dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga ibu ?	Program PKH ini walupun tidak terlalu banyak setidaknya bisa bantu memenuhi kebuthan seperti makanan yang bergizi untuk anak saya dan digunakan untuk anak sekolah dan membeli perlengkapan sekolah.
4	Asmiati	Bagaimanakah anda memenuhi kebutuhan pokok keluarga ?	Disini pekerjaan yang paling banyak kan petani Cuma disini juga anak sebagai buruh sepatu atau tukang sepatu yang mana penghasilannya pas-pasan. Jadi kalau untuk makan ya seadanya saja yang penting terpenuhi dan bisa makan. Kalau bangun rumah belum bisa karena masih banyak yang harus dipenuhi
		Apakah bantuan PKH	Program PKH ini sekiranya bisa

		ini sekiranya dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga ibu ?	membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga kami dengan baya sekolah dan anak saya juga mendapatkan perwatan gizi, serta dana sisanya saya gunakan untuk modal usaha walupun sedikit.
5	Novi	Bagaimana anda memenuhi kebutuhan pokok keluarga ?	Kalau untuk makan saya bisa menggunakan sisa dagangan saya. Tapi kalau untuk pakain mungkin pas hari raya saja. Apalagi buat bayar kontrakan yang belum mampu.
		Apakah bantuan PKH ini sekiranya dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga ibu ?	Dengan adanya program ini dapat membantu untuk membeli keperluan sekolah anak-anak saya jadi bisa tambah-tambah beli barang lainnya

Sumber: Hasil Penelitian

Table diatas menjelaskan bahwa masyarakat Nagari Balingka kebanyakan dalam memenuhi kebutuhan pangan dari persediaan beras dari sawahnya, sehingga sebagian penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti pakaian ataupun barang lainnya yang sekiranya bisa dibeli.

Namun dalam memenuhi kebutuhan pokoknya harus terbagi untuk biaya keperluan pendidikan anak-anak. Adanya program PKH ini sekiranya dapat

memebantu biaya pendidikan dan pemenuhan kebuthan sekolah serta dapat memberikan pemenuhan gizi bagi keluarga dan dananya sisa nya digunakan untuk tambahan modal usaha sehingga penghasilan dapat digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya. Dan dari pihak lansia juga mendapatkan biasa hidup dari program PKH ini dan bisa membantu dalam kebutuhan pokoknya juga serta dapat membuka usaha kecil-kecilan. Hal ini searah dengan pernyataan pendamping program PKH[47]

Jadi peran adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini dalam penanggulan kemiskinan, sudah maksimal dalam pembagian bantuan atau sudah mencapai sasaran dengan baik karena peran PKH meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Peran PKH selain itu juga sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Jadi secara khusus peran PKH itu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM.
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM.
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin.

Hal ini pendamping PKH berpendampat yaitu:

47 Wawancara ibuk selvy anggrayni, Pendamping PKH Nagari Balingka, pada senin, 30 januari 2023, jam 09:00 WIB

“sejauh ini program PKH sudah Berjalan sesuai dengan ketentuan dari kemensos saran kedepaan nya pemerintah daerah lebih memperhatikan fasilitas penunjang kinerja pendampng PKH, untuk kesuksesan program PKH kearah yang lebih baik”

Adapun dengan bantuan tersebut di harapkan peran pemerintah penuh dalam hal ini. Pentinganya peranan pemerintah daerah menjadi ukuran keberhasilan program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan. Sejauh mana peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan di lapangan. Sulitnya berkoordinasi dan respon dari instansi terkait begitu lambat dan mengabaikan yang menjadi kendala bagi PKH haruslah dapat diminimalisasi dengan itu kedepannya lebih bisa mengontrol keadaan program PKH tersebut.

BAB

V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bahwa peran pemerintah dalam mengelola program keluarga harapan di nagari Balingka kecamatan IV koto kabupaten Agam belum memberikan hasil yang baik terhadap perekonomian KPM yang hanya berfokus kepada bantuan langsung tunai, Hal ini dapat dibuktikan di lapangan sebagai berikut:

1. Pendamping PKH mengumpulkan data melalui survei ke lapangan lalu setelah dimasukan kedalam DTKS barulah untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah di validasi kemudian di catatkan di dalam aplikasi sistem informasi sistem kesejhteraan sosial (SIKS) *offline* oleh operator Desa dan Kecamatan untuk kemudian di kirim ke Dinas Sosial Kabupaten Agam.
2. Program keluarga harapan di Balingka masih mempunyai suatu

permasalahan Faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan di nagari balingka . Dimana, faktor penghambatnya diantaranya ialah: kurangnya koordinasi sensus penduduk, perencanaan pengembangan dalam program keluarga harapan, keterjangkauan tempat menjadi masalah yang mengakibatkan kurang efektifnya Program ini.

B.Saran

1. Kepada pemerintah desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pendataan yang lebih merata untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan ini dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya kesenjangan antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH.
2. Kepada pemerintah desa diharapkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terealisasi dengan baik yang memenuhi komponen dari bantuan PKH itu, yaitu kesehatan, pendidikn, dan juga kesejahteraan msyarakat. Dimana, distribusi dari bantuan PKH ini sesuai dan tepat sasaran.
3. Kepada pendamping PKH agar memperhatikan perencanaan pengembangan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), untuk tidak hanya sekedar memberikan materi namun juga pengarahan secara menyeluruh yang mampu mengubah pola fikir masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Kepada keluarga penerima manfaat PKH diharapkan mengikuti pembinaan P2K2 dengan serius guna untuk meningkatkan wawasan dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, penyandang desabilitas dan kesejahteraan sosial agar tercapai tujuan dari PKH yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam. 2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar-RuzzMedia.

Dwi, Nazwa Archika. (2020) “Corona Virus Disease 2019” Pendidikan Jasmani Olah raga Kesehatan, Medan.

G., Richard Lipsey dan peter O.Steiner, Pengatar ilmu ekonomi, Rineka cipta.

Hanifa, Nurul dan Ladi Wajuba Perdini Fisabililla. (2021). *Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,* Welfare Jurnal Ilmu Ekonom, Volume 2 Nomor 1.

J., Lexy Meleong. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif,* **(**Bandung: Remaja Rosdakarya. cet ke 5.

Kementrian kesehatan. (2020) kemenkes padang . *Coronavirus,* Akses pada tanggal 5 september 2022.

Kementrian sosial. (2018). Program keluarga harapan, Akses pada tangal 5 september 2022.

Luthfiana, Arina dan Alip Sugiannto. (2020). *Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia,* Seminar Nasional Potensi dan Kemandirian Daerah: Optimalisasi Potensi Sumber Daya Ekonomi Menuju Kesejahteraan Daerah.

Mappiare, Andi AT. (2009). *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Social Dan Profesi*,(Malang: Jenggala Pustaka Utama).

Nasrun, Ali. (2020). *Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu* Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 isbn.

Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia. (2018) Kementrian sosial, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 dan Pasal 5, Diakses Pada 6 september 2022.

Putong, Iskandar. (2008). Ekonomic pengantar mikro dan makro, Jakarta:mitra wacana media.

Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia. 2018. Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 7, Diakses Pada 6 september 2022, Kementrian sosial. Akses Pukul 13:03

Reinalda, Baiq Triyunarni Dkk. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Administrasi Public Vol. 7 No. 2 September*.

Rufaidah, Erlina. (2015) ilmu ekonomi, Yogyakarta: Graha ilmu.

Setyo, Andi Pambudi dkk. (2020). *Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia*. Volume 1 No. 1

Sutrisno, Edy. (2020). *Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui*

Sektor Umkm Dan Pariwisata Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Volume 9 n o 1.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Syafri, Hendra. (2018). *pengantar ilmu ekonomi*. palopo: lembaga penerbit kampus.

Umar, Husein. (2008). *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara dengan Bapak Resman selaku Koordinator PKH, padal 1 Februari 2023, jam 11:00

Wawancara langsung dengan ibuk Silvy Agrayni. Pendamping program keluarga harapan IV koto. pada tanggal 6 0ktober 2022 jam 14.15 WIB.

Wawancara langsung dengan ibuk Silvy Agrayni. Pendamping program keluarga harapan IV koto. pada tanggal 30 Januari 2023 jam 09.00WIB

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungann*, (Jakarta: Prenadameia Group).

DOKUMUMENTASI



RIWAYAT PENULIS



Nama : Rahmad Rusdi

NIM : 3217.118

TTL : Balingka, 09 Juni 1996

Alamat : Balingka, kec. IV Koto, kab. Agam, Sumatra Barat Nama Ayah : Rusdi

Nama Ibu : Sulastri

Nama Kakak: Novia Mega Sari

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 25 Subarang Balingka
2. SMP 1 IV Koto
3. SMA 1 IV Koto
4. UIN SMDD Bukittinggi